

SKRIPSI

RIFKY NURACHMAN

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN (STUDI KASUS : PDAM WILAYAH KOTA SEMARANG)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
(STUDI KASUS : PDAM WILAYAH KOTA SEMARANG)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akademik
Dan memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., M.S
NIP. 130 28703

Disusun Oleh

Rifky Nurachman
NIM. 039514150

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

- a. Dalam praktek perjanjian yang dibuat oleh pihak PDAM dengan pihak pelanggan merupakan perjanjian yang bersifat standart contracten (standar kontrak) yang dibuat oleh pihak produsen (PDAM). Dimana baik bentuk dan isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan oleh PDAM. Sehingga dalam hal ini "bargainig position" dari pelanggan sangat lemah. Perjanjian yang dibuat oleh pihak PDAM dengan pihak pelanggan selain merupakan perjanjian jual beli juga merupakan perjanjian sewa menyewa. Oleh karena itu hubungan hukum antara PDAM dengan pelanggan termasuk dalam kategori perjanjian campuran.
- b. Tuntutan ganti rugi pelanggan air terhadap PDAM Kota Semarang pada dasarnya terkait dengan terjadinya gangguan-gangguan dalam hal pemenuhan dan pelayanan air minum oleh PDAM Kota Semarang.

Akan tetapi pada dasarnya tuntutan ganti rugi oleh pelanggan kepada PDAM adalah akibat terjadinya gangguan air yang berakibat timbulnya kerugian bagi pihak pelanggan, PDAM tidak akan memberikan ganti rugi hal ini sesuai dengan kontrak perjanjian dimana disana disebutkan bahwa pelanggan bersedia menerima aliran air sesuai dengan kondisi kemampuan jaringan yang ada pada PDAM kota Semarang. Dan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 12 Kep. Walikodisa KDH TK II Semarang No. 690/759/1997.

4.2 Saran

- a. Diharapkan peran serta dari pemerintah untuk lebih memperhatikan dan berusaha untuk menciptakan pola keseimbangan dalam konteks hubungan hukum, maka posisi kesejajaran atau keseimbangan tersebut harus diciptakan. Dalam bentuk atau wadahnya adalah dalam standart contract tersebut dengan secara seimbang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak.

- b. Dalam hal mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul pada diri pelanggan sebagai akibat tidak lancarnya pemenuhan dan penyediaan air oleh PDAM, hendaknya para pelanggan atau konsumen air harus hati-hati. Karena dalam mengajukan tuntutan ganti rugi harus bisa mencermati dan menganalisa apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak produsen (PDAM) dalam hal ini merupakan penyimpangan terhadap apa yang telah disepakati.